

**Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Menggunakan Pendekatan *Community Based Tourism* (CBT) di Desa Wisata Kandri, Kota Semarang**

**Nadira Aracelya Azzahra\*), Budi Setiyono\*\*), D. Ghulam Manar\*\*)**

**Email: [nadiraaracelya@gmail.com](mailto:nadiraaracelya@gmail.com), [budisetiyono@lecturer.undip.ac.id](mailto:budisetiyono@lecturer.undip.ac.id),  
[dgmanar@gmail.com](mailto:dgmanar@gmail.com)**

**Departemen Politik dan Pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Prof.H.Soedarto,SH Tembalang Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan Desa Wisata Kandri serta menjelaskan penyebab dari adanya ketidakefektifan dalam pengelolaannya dengan mengacu pada konsep ideal CBT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus berlandaskan pada teori CBT. Data dikumpulkan dengan metode wawancara yang mendalam dan observasi. Adapun para informan tersebut dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang digunakan untuk meraih informasi kunci dalam penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif yang berlangsung terus-menerus hingga data yang diperlukan cukup.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidakefektifan dan permasalahan yang dihadapi oleh Pokdarwis di Desa Wisata Kandri seperti adanya isu persaingan dan konflik antar kedua Pokdarwis yang berpengaruh pada adanya sikap mengutamakan dan mengejar keuntungan ekonomi semata. Beberapa kendala dan ketidakefektifan tersebut berkaitan dengan masalah pada pengelolaan oleh Pokdarwisnya yang pada akhirnya tidak mencerminkan prinsip CBT lainnya seperti minimnya partisipasi masyarakat, kurangnya manfaat yang dirasakan masyarakat, hingga terabaikannya aspek lingkungan dan budaya sebagai kearifan lokal yang dimiliki Desa Wisata Kandri. Penelitian ini menyarankan perlunya studi lebih lanjut mengenai upaya-upaya keseriusan pemerintah sebagai fasilitator dalam membersamai masyarakat dan kelompok lokal pada Desa Wisata untuk menemukan formulasi yang tepat bagi pembangunan Desa Wisata yang mampu menjadikan masyarakat berdaya dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Community Based Tourism*, Desa Wisata, Partisipasi.

## **ABSTRACT**

*This research was conducted with the aim of identifying problems in the management of the Desa Wisata Kandri and explaining the causes of the non-optimal management by referring to the ideal concept of CBT. This research uses a descriptive qualitative research method with a case study approach based on CBT theory. Data were collected by in-depth interviews and observation methods. The informants were selected using purposive sampling techniques used to obtain key information in research. Data analysis techniques use interactive analysis that continues until the required data is sufficient.*

*The results of this study indicate that there are non-optimum and problems faced by Pokdarwis in the Desa Wisata Kandri such as the issue of competition and conflict between the two Pokdarwis which has an effect on the attitude of prioritizing and pursuing economic gain alone. Some of these constraints and non-optimalities are related to problems with management by the Pokdarwis which in the end do not reflect other CBT principles such as the lack of community participation, the lack of benefits felt by the community, to the neglect of environmental and cultural aspects as local wisdom owned by the Desa Wisata Kandri. This research suggests the need for further studies regarding the government's serious efforts as a facilitator in assisting local communities and groups in tourist villages to find the right formulation for the development of tourist villages that are able to make communities empowered and sustainable.*

**Keywords:** *Community Based Tourism, Tourism Village, Participation.*

\*) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

\*\*\*) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

## **PENDAHULUAN**

Pariwisata menjadi sektor yang berimbang positif pada pembangunan nasional dan berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi pada berbagai aspek yang dapat berimbang pada semakin luasnya kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat (Ika, 2020: 1). Menilik situasi yang terjadi, menurut Wahyuni (2019: 92) nyatanya pariwisata yang dibangun di Indonesia seringkali membawa dampak buruk bagi lingkungan dan sosial di sekitar tempat

wisata itu sendiri. Seringkali menciptakan kesenjangan antara pemilik modal atau pemilik pariwisata dengan masyarakat setempat, serta potensi sosial dan ekonomi masyarakat yang turut termarginalkan.

Berangkat dari persoalan tersebut, pemerintah selanjutnya berupaya memperkenalkan konsep pariwisata berkelanjutan. Sejatinya, pariwisata berkelanjutan seperti yang disebutkan dalam Piagam Pariwisata Berkelanjutan (dalam Arida dan Sunarta,

2017: 20) harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan yang artinya bahwa pembangunan dapat didukung secara ekologis yang berjangka panjang sekaligus layak secara ekonomi, serta bersifat adil secara etika dan sosial.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan kemudian ditunjukkan melalui pendekatan yang dikenal dengan *Community Based Tourism* (CBT) (Nurhidayati, 2007: 196). CBT merupakan konsep pembangunan wisata yang memperhatikan masyarakat, konservasi lingkungan, dan budaya (Nurhidayati, 2007: 196). Pada kelompok negara yang tergabung dalam APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*) turut menekankan CBT sebagai alat pembangunan yang penting dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (Putra, 2015). Lahirnya konsep CBT merupakan suatu bentuk kritik sekaligus solusi atas model pembangunan kepariwisataan konvensional yang dipandang kurang mampu memberdayakan dan meminggirkan masyarakat serta tidak memperhatikan aspek lingkungan dan budaya (Purmada dan Hakim, 2016: 16).

Berpijak dari pendekatan *Community Based Tourism*, muncul Desa Wisata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Desa Wisata merupakan suatu wilayah yang mengintegrasikan daya tarik wisata, dimana semuanya tersaji dalam suatu struktur kehidupan dan menyatu dengan tradisi atau adat yang ada di tengah masyarakat (Effreyza, 2019: 3). Anwas menyebutkan (dalam Ika, 2020: 3) bahwa masyarakat disadarkan akan potensi desa untuk dikembangkan serta perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk memberdayakan potensi wisata tersebut, sebab keberhasilan Desa Wisata bergantung pada aspek pengelolaannya.

Beragam Desa Wisata yang dikembangkan oleh pemerintah, salah satunya di Kota Semarang yaitu Desa Wisata Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang menetapkan Desa Wisata Kandri sejak 21 Desember 2012 melalui Surat Keputusan (SK) Walikota Semarang Nomor 556/407. Kekayaan potensi yang terdapat di Desa Wisata Kandri sendiri mulai dari kesenian, potensi alam maupun buatan, wisata kuliner, serta wisata edukasi yang dapat

di-optimalisasi. Namun, pengelolaan Desa Wisata Kandri ini pada kenyataannya bukan tanpa permasalahan. Sebagaimana pendapat Ellis dan Sheridan dalam Pawson (2017: 6) yang mengidentifikasi adanya ketidakefektifan yaitu pada partisipasi masyarakat. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Ketua Hysteria Semarang, terdapat pula kendala dalam hal komunikasi dalam hal ini belum semua masyarakat terlibat dalam mengelola potensi Desa Wisata Kandri. Tidak secara keseluruhan masyarakat dilibatkan dalam forum-forum diskusi di tingkat kelurahan maupun pertemuan rutin sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui informasi dengan baik.

Beranjak dari beberapa problematika yang masih terdapat dalam pengelolaan Desa Wisata Kandri, Yaman dan Mohd (dalam Nurhidayati, 2007: 198) menyebutkan bahwa beberapa kunci dari pengelolaan dan pembangunan pariwisata dengan menggunakan pendekatan CBT yaitu adanya dukungan pemerintah, partisipasi dari *stakeholder* dan organisasi atau kelompok lokal. Sebab dalam rangka mewujudkan wisata yang berbasis pada pendekatan CBT, tentu di dalamnya

terdapat elemen organisasi masyarakat dan partisipasi masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya belum terdapat identifikasi lebih mendalam terkait kendala tersebut. Dimana ketidakefektifan tersebut juga dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dan pengelolaan kelompok lokal yang tentu akan berimbas pada banyak aspek seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya. Berdasarkan uraian di atas, alhasil penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih mendalam mengenai pengelolaan dan pembangunan pariwisata di Desa Wisata Kandri serta menganalisis kendala yang menjadi akar permasalahan dalam pengelolaan wisata mengacu pada CBT sebagai pendekatan dalam pembangunan berkelanjutan.

## **TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan Desa Wisata Kandri mengacu pada konsep ideal CBT. Serta mengidentifikasi faktor mengapa penerapan CBT dalam pengelolaan Desa Wisata Kandri belum sepenuhnya optimal.

## **KERANGKA TEORI**

### **Pariwisata Berkelanjutan**

Pariwisata berkelanjutan ini mengusung pengembangan dengan segala unsurnya yang juga menjadi sebuah investasi dalam sektor pariwisata, dimana pariwisata sudah semestinya lebih memperhatikan serta tidak membawa dampak buruk bagi lingkungan. Dalam jangka yang panjang tersebut mencakup upaya pengembangan yang diarahkan untuk peningkatan kapasitas secara sosial, ekonomi, dan keindahan atau keutuhan ekologi, budaya, dan keanekaragaman yang lainnya (Kemenpar, 2016: 27).

Adapun dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan mengacu pada beberapa prinsip dalam Arida dan Sunarta (2017: 22-24), yaitu:

- a. Pariwisata perlu dibangun dengan melibatkan masyarakat lokal, mulai dari pelibatan pendapat serta untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Sehingga masyarakat lokal akan mempunyai rasa memiliki untuk bertanggung jawab, meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap pelestarian
- b. Menciptakan keseimbangan antara masyarakat dan kebutuhan wisatawan melalui kerjasama yang solid antar aktor.
- c. Segala program pembinaan yang berhubungan dengan kepariwisataan harus mengutamakan masyarakat dan industri yang ada di wilayah tersebut. Program harus mampu meningkatkan kesempatan kepada masyarakat untuk membuka usaha dan menjadi pelaku ekonomi tanpa mengesampingkan lingkungan.
- d. Pembangunan yang berkelanjutan dalam pariwisata meliputi promosi penggunaan lahan serta kegiatan yang memperkuat sense of place dan karakter masyarakat setempat.
- e. Adanya kerjasama antara masyarakat lokal dengan para pelaksana pariwisata yang saling menguntungkan antara satu sama lain.
- f. Pembangunan pariwisata harus mempertimbangkan peraturan perundang-undangan sehingga pembangunan pariwisata dapat

berjalan tanpa hambatan. Oleh karena itu masyarakat turut berperan dalam pengawasan agar berjalan sebagaimana mestinya.

- g. Pembangunan pariwisata harus berkontribusi pada kebutuhan dan kepuasan dasar masyarakat yang masih cenderung dikecualikan. Dimana pariwisata menjamin keberlanjutan, artinya memberikan keuntungan bagi masyarakat saat ini dengan tidak merugikan generasi yang akan datang hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
- h. Pariwisata perlu berpijak dalam prinsip optimalisasi dan konservasi bukan pada eksploitasi.
- i. Perlunya monitoring dan evaluasi untuk memastikan pembangunan pariwisata berjalan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- j. Harus ada keterbukaan terhadap penggunaan sumber daya serta dipastikan sumber daya tersebut tidak disalah gunakan.
- k. Melakukan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan, pelatihan, pembinaan dan

sertifikasi agar para pekerja memiliki keahlian sesuai bidang masing-masing.

### ***Community Based Tourism***

Konsep CBT lahir sebagai pembangunan yang relatif baru yang didasarkan pada pendekatan partisipatif. Pernyataan tersebut turut dipertegas oleh Sidiq dan Resnawaty (2017: 39) bahwa *Community Based Tourism* merupakan model pembangunan yang memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata dalam hal ini termasuk ide kegiatan dan pengelolaan yang seluruhnya dilakukan oleh masyarakat secara partisipatif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Dimana menurut Zuze, CBT ini berfokus pada hal-hal yang utama, yaitu pilar pembangunan dan konservasi, pembangunan wilayah pedesaan dan demokrasi, serta *good governance* (adanya tata kelola yang baik dari kelembagaan) (Moren & Lezego, 2020).

*Community Based Tourism* selalu berkaitan erat dengan adanya partisipasi dari masyarakat setempat

secara aktif dalam pengembangan dan pembangunan pariwisata. Berdasar pada yang disampaikan oleh Sunaryo dalam Nurhidayati (2007: 197) terdapat beberapa prinsip yang mendasari perencanaan dan pelaksanaan *Community Based Tourism*, yaitu:

- Mengikutsertakan masyarakat lokal setempat dalam setiap tahap pembangunan dan pengambilan keputusan.
- Adanya kepastian masyarakat lokal dalam menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan.
- Menjamin sustainabilitas lingkungan.
- Memelihara karakter dan budaya lokal yang unik.

Menurut Potjana Suansri (2003), dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (CBT) terdapat beberapa aspek yang perlu diberdayakan, yakni:

1. Asset sosial yang dimiliki oleh masyarakat lokal seperti budaya, tradisi, adat istiadat, aktivitas dan gaya hidup. Keaslian dan sumber daya alam terjaga dengan baik, ekonomi lokal serta menjamin kelestarian budaya yang unik.

2. Sarana dan prasarana yang perlu untuk dipenuhi agar ideal dalam rangka memenuhi kebutuhan pengunjung atau wisatawan.
3. Organisasi, apakah terdapat organisasi masyarakat lokal yang mampu mengelola daya tarik wisatanya secara mandiri. memiliki tokoh yang menjadi panutan yang mengerti akan tradisi lokal dan pengetahuan serta kebijakan setempat, serta masyarakat memiliki rasa bangga akan memiliki dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan yang dilakukan oleh mereka sendiri.
4. Kegiatan ekonomi, mengenai bagaimana rantai aktivitas perekonomian pariwisata di wilayah tersebut, apakah telah terdapat distribusi manfaat perekonomian di tengah masyarakat ataukah manfaat tersebut hanya sampai dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu.
5. Adanya proses pembelajaran yang menjadi salah satu aspek krusial dalam rangka membangun pemahaman masyarakat mengenai daya tarik

wisata. Membina proses belajar bersama antara masyarakat dan pengunjung, mendidik dan membangun pemahaman tentang budaya dan cara hidup yang beragam, meningkatkan kesadaran konservasi alam dan budaya di kalangan wisatawan dan masyarakat setempat.

### **Desa Wisata**

Desa Wisata hadir sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan *Community Based Tourism*. Menurut Totok Mardikanto, dkk sebagaimana dikutip dalam Effreyza (2019: 7) menyatakan bahwa Desa Wisata adalah suatu wilayah atau Kawasan pedesaan yang merepresentasikan keaslian suasana pedesaan, baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, hingga bentuk arsitektur dan struktur tata ruang desa yang khas, yang di dalamnya tertanam beragam potensi, aktivitas maupun kegiatan perekonomian yang unik dan menarik untuk dikembangkan sebagai suatu komponen pariwisata.

Pengembangan Desa Wisata berbasis masyarakat sebagai suatu asset

dalam sektor pariwisata dan perekonomian guna menopang pertumbuhan ekonomi pariwisata di daerah. Oleh karenanya perlu adanya pemenuhan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Tidak bersebarangan dengan adat istiadat dan budaya selaku kearifan lokal masyarakat di wilayah setempat. Pengembangan Desa Wisata ini perlu memperhatikan kehidupan social budaya serta disesuaikan dengan pola perilaku, kebiasaan dan tata cara yang berlaku di wilayah tersebut. Begitupun dengan wisatawan yang berkunjung paling tidak juga turut memahami budaya, tata cara dan karakter di wilayah tersebut.
- b. Pembangunan yang dilakukan turut meningkatkan kualitas lingkungan di wilayah tersebut. Pembangunan yang dilakukan semestinya tidak berupaya untuk mengubah apa yang sudah ada dan menjadi ciri khas di wilayah tersebut, namun lebih pada upaya untuk membuat suatu aspek yang sudah ada tersebut untuk kemudian menjadi daya



tarik untuk dijadikan atraksi wisata. Sehingga pembangunan tersebut tidak mengganggu kearifan lokal dan tetap mampu menarik dan dinikmati wisatawan.

- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar Desa Wisata. Masyarakat menjadi unsur yang penting keterlibatannya dalam pengembangan Desa Wisata. Masyarakat dapat terlibat langsung dan merasakan manfaatnya dalam kegiatan pariwisata dalam bentuk pemberian layanan dan jasa. Dengan itu akan berimbas pada peningkatan perekonomian masyarakat di luar aktivitas utama mereka.
- d. Melalui adanya kegiatan pengembangan Desa Wisata ini harapannya dapat meningkatkan pemerataan dan keadilan bagi seluruh lapis masyarakat sesuai dengan prinsip dalam konsep pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berjangka panjang. Sebab di lain sisi, terbentuknya Desa Wisata ini secara tidak langsung mendukung produk wisata yang

lebih menonjolkan kearifan dan keaslian desa bernilai budaya, alam, dan sosial masyarakat tanpa merusaknya

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan metode kualitatif deskriptif. Dimana penelitian yang bersifat deskriptif ini tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variable, gejala, atau keadaan. Pendekatan artikel ini menggunakan sudut pandang atau pemikiran penulis berdasarkan peristiwa atau fenomena yang terjadi sebenarnya. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menjabarkan bagaimana pengelolaan pariwisata di Desa Wisata Kandri berdasar pada konsep CBT. Dengan itu akan diidentifikasi pengelolaannya berdasar pada indikator CBT sehingga dapat dikaji faktor yang menjadi penghambat dan ketidakefektifan dalam mengelola Desa Wisata Kandri terutama dari aspek sumber daya manusianya seperti partisipasi masyarakat dan tata kelola oleh organisasi lokalnya.

Adapun penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kandri tepatnya di wilayah Desa Wisata Kandri. Hal tersebut dikarenakan peneliti hendak mengidentifikasi aspek atau hal-hal dalam pengelolaan pariwisata di Desa Wisata Kandri yang belum optimal terutama pada aspek organisasi lokal dan partisipasi masyarakat berdasar pada prinsip *Community Based Tourism*.

Penelitian ini akan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk mengambil data penelitian melalui berbagai pertimbangan. Adapun untuk mengetahui penerapan pendekatan CBT dalam pengelolaan dan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Desa Kandri, maka diperlukan subjek yaitu Kepala Kelurahan Kandri, Ketua Desa Wisata Kandri, masyarakat yang terlibat serta masyarakat setempat bukan anggota Pokdarwis dan juga pengurus serta anggota kedua Pokdarwis sebagai pihak pengelola atau organisasi lokal di Desa Wisata Kandri. Dengan itu akan mempermudah peneliti untuk mendapatkan dan menganalisis informasi dari berbagai perspektif mengenai hal-hal yang menjadi faktor ketidakefektifan penerapan CBT dalam pengelolaan dan pembangunan

pariwisata berkelanjutan di Desa Wisata Kandri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **1. Ketidakefektifan dalam Pengelolaan Desa Wisata Kandri Mengacu pada *Community Based Tourism***

#### **1.1 Rendahnya Peran dan Partisipasi Seluruh Masyarakat**

Desa Wisata Kandri atas keinginan tokoh masyarakat untuk merubah nasib masyarakat dan atas kesadaran masyarakat, nyatanya dalam keberlanjutannya tidak sepenuhnya mengacu pada prinsip ideal CBT. Namun sayangnya bila menilik kondisi di lapangan pada prinsip mengikutsertakan peran seluruh masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan masih kurang optimal tampak pada pengelolaan Desa Wisata Kandri. Dari seluruh warga Kelurahan Kandri, sayangnya hanya mereka yang menjadi anggota Pokdarwis saja yang dilibatkan dalam proses perencanaan, rapat dan diskusi rutin terkait pengembangan Desa Wisata Kandri. Kecenderungan yang

terjadi adalah segala paket wisata maupun objek wisata yang ada ini hampir keseluruhan dikelola oleh mereka yang menjadi anggota Pokdarwis. Tampak disini bahwa dominan pengelolaan hanya dikendalikan oleh Pokdarwis saja. Sebab jika melibatkan keseluruhan masyarakat dianggap terlalu banyak pendapat dan yang akhirnya akan berujung rumit.

Nyatanya baik pelatihan maupun rapat-rapat perencanaan hingga evaluasi itu hanya diikuti oleh tokoh-tokoh pengelola serta masyarakat yang hanya berkecimpung dalam kegiatan pariwisata. Akibatnya masyarakat luas yang tidak terlibat langsung dalam pariwisata ini tidak pernah mendapatkan edukasi atau pemahaman lebih lanjut mengenai esensi dari Desa Wisata dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam hal ini masyarakat yang terlibat hanya itu-itu saja sehingga yang mendapatkan manfaat ekonomi juga hanya itu-itu saja.

Ketidakefektifan tersebutlah menjadi alasan mengapa masyarakat pada akhirnya menjadi kurang tertarik untuk berpartisipasi dalam kegiatan di Desa Wisata Kandri. Dalam hal partisipasi terkait pelatihan maupun sosialisasi yang diberikan oleh mitra maupun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, seringkali masyarakat yang menghadiri pelatihan ini hanya anggota Pokdarwis. Sehingga pemahaman dan daya tanggap masyarakat terhadap kegiatan pariwisata yang dirasakan masih kurang.

Lemahnya partisipasi dari masyarakat ini juga timbul karena pemikiran dan kepentingan kedua Pokdarwis yang kemudian melahirkan permasalahan yang kompleks. Ditambah koordinasi dan komunikasi antara Pokdarwis dengan Pemerintah Kelurahan maupun Pemerintah Kota yang masih kurang berjalan dengan optimal. Hal tersebut akhirnya menyebabkan peran masyarakat menjadi sangat minim dan

masyarakat yang bukan anggota Pokdarwis ini hanya dijadikan sebagai pendengar saja bukan sebagai aktor yang terlibat dalam proses penentuan keputusan. Sebagian besar masyarakat juga menganggap bahwa kegiatan wisata ini sebagai ladang mengejar kepentingan ekonomi. Tidak sedikit dari kegiatan yang dikelola oleh Pokdarwis ini orientasinya hanya pada hasil ekonomi yang menguntungkan. Hal ini berimbas pada masyarakat yang dilibatkan dalam paket wisata juga merupakan keluarga dari anggota Pokdarwis yang kemudian menjadi anggota Pokdarwis juga.

Masyarakat yang bukan anggota Pokdarwis cenderung pasif dan manut saja dengan hasil dan perintah dari Pokdarwis. Hal ini juga berimbas pada terhambatnya regenerasi kepemimpinan Pokdarwis yang cenderung sulit untuk mendapatkan generasi muda yang betul-betul sadar akan pemberdayaan masyarakat melalui Desa Wisata ini. Bila menurut CBT, kondisi tersebut

belum mencerminkan prinsip CBT yang ideal sebab dalam CBT ini mengutamakan tata kelola pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat aktif dalam pembangunan pariwisata termasuk dalam sumbangsih ide dan pengambilan keputusan. Dimana keikutsertaan dan peran serta dari masyarakat menjadi suatu kekuatan yang penting yang meliputi keseluruhan masyarakat tanpa terkecuali bahkan hingga masyarakat kurang mampu dan kurang beruntung dalam suatu wilayah. Partisipasi inilah yang nantinya secara tidak langsung akan melatih masyarakat menjadi semakin berdaya.

## **1.2 Minimnya Manfaat yang Dirasakan Masyarakat Sekitar**

Pada Desa Wisata Kandri, masih dijumpai beberapa penerapan konsep Desa Wisata Berbasis Masyarakat berkelanjutan (CBT) yang kurang optimal dalam pengelolaannya. Dari seluruh warga Kelurahan Kandri hanya

sebagian saja yang sudah merasakan manfaat secara nyata utamanya bagi anggota Pokdarwis saja. Sedangkan warga yang tidak ikut berpartisipasi langsung dan tidak menjadi anggota kelompok sadar wisata, maupun tidak memiliki usaha di bidang kepariwisataan memang sampai saat ini belum merasakan manfaat dari Desa Wisata Kandri. Minimnya tingkat partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan wisata berpengaruh pada minimnya juga manfaat yang diterima masyarakat. Bahkan masyarakat lebih memilih untuk bekerja mandiri dibandingkan terlibat dalam kegiatan pariwisata karena masyarakat tidak mendapatkan esensi dari adanya Desa Wisata Kandri dan tidak mendapat manfaat baik secara pembangunan maupun manfaat secara ekonomis. Hal tersebut dikarenakan segala hasil dari kegiatan wisata ini langsung dibagikan kepada yang terlibat dan berkaitan dengan kegiatan wisata, artinya tidak ada

kewajiban untuk mendistribusikan hasil ekonomi ke kas Desa Wisata Kandri. Dengan demikian indikator penerimaan manfaat dari pengembangan Desa Wisata Kandri secara merata pada masyarakat di Kelurahan Kandri belum terpenuhi.

Manfaat dari adanya Desa Wisata Kandri bagi pemberdayaan masyarakat juga tidaklah jauh dari bagaimana kelembagaan dalam hal ini Pokdarwis dalam mengelola potensi Desa Wisata Kandri. Pokdarwis inilah yang bertugas dalam mengakomodasi dan menjembatani segala kebutuhan pelaku Desa Wisata dan masyarakat dengan pemerintah. Namun dari Pokdarwis sendiri seperti tidak ada keinginan untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam mampu menciptakan iklim pemberdayaan bagi masyarakat yang mampu menstimulasi semangat untuk berlomba-lomba melahirkan inovasi unggul yang mampu menjadi daya tarik bagi Desa Wisata Kandri.

Minim adanya kemauan dari Pokdarwis untuk mengikutsertakan dan menciptakan iklim usaha di tengah masyarakat. Sehingga segala kegiatan yang ada yang diutamakan hanya pada peningkatan perekonomian yang keseluruhannya dikelola oleh mereka yang menjadi anggota Pokdarwis. Hal ini berawal dari munculnya kelompok oportunistis yang mempengaruhi masyarakat utamanya di RW 3 Kampung Talun Kacang. Kemudian terbentuklah Pokdarwis Sukomakmur yang berlandaskan keinginan untuk mendapatkan manfaat ekonomi sebesar-besarnya dan instan dengan kehadiran Waduk Jatibarang dan Goa Kreo tanpa memikirkan bagaimana keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya yang menjadi kearifan lokal di Kandri.

Sangat disayangkan justru yang terjadi saat ini diantara kedua Pokdarwis ini pada akhirnya seperti bersaing untuk mendapatkan pengunjung sebanyak-banyaknya yang justru

menimbulkan pembangunan-pembangunan atau kegiatan wisata yang kurang menonjolkan potensi atau kearifan lokal dari Kandri itu sendiri melainkan yang diutamakan adalah objek yang sedang ramai saja. Adanya perbedaan dari cara pengekspresian dan kepentingan akan meraih keuntungan antar Pokdarwis inilah yang secara tidak langsung berimbas pada permasalahan pada aspek lainnya termasuk Pokdarwis yang kurang mampu memberikan andil dalam menjadikan seluruh masyarakat berdaya. Dimana hal tersebut berimbas pada manfaat yang tidak terdistribusi secara merata bagi masyarakat baik yang terlibat langsung maupun tidak terlibat langsung. Pada akhirnya mereka yang tidak terlibat langsung ini seakan tidak mendapatkan kesempatan dan esensi yang sesungguhnya dari adanya pemberdayaan berupa Desa Wisata di Kelurahan Kandri

### **1.3 Terbaiknya Aspek Lingkungan dan Budaya sebagai Keunikan dan Kearifan Lokal**

Suatu pengelolaan daya tarik wisata agar mampu berkelanjutan semestinya pengelolaan yang dilakukan juga harus sesuai dengan prinsip memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Desa Wisata Kandri sendiri jika ditinjau dari prinsip menjamin keberlanjutan lingkungan masih dijumpai kelemahan dalam memelihara keberlanjutan lingkungan hal ini tampak pada beberapa hal dalam pembangunan dan pengembangan Desa Wisata Kandri.

Selama ini pemerintah beranggapan bahwa mereka sudah mendukung kegiatan wisata di Kandri berupa pembangunan fisik namun mereka melupakan aspek pembangunan SDM dan SDA-nya dimana aspek tersebutlah yang menjadi perhatian utama dalam konsep pembangunan Desa Wisata berbasis masyarakat yang dapat berkelanjutan. Kebanyakan CSR hanya berfokus pada pembangunan fasilitas fisik. Dimana adanya kerjasama tersebut sifatnya

hanya sementara dan tidak berkelanjutan. Pemberian dana tidak ditujukan pada pemberdayaan yang sifatnya dapat membantu meningkatkan kemandirian masyarakat lokal. Akhirnya pengelola banyak gencar membangun fasilitas yang justru memakan pohon-pohon serta kawasan hijau di Kandri tanpa adanya perencanaan yang matang. Yang masih belum disadari adalah pengelola ini belum memperhatikan daya dukung lingkungan. Mereka mengutamakan menerima pengunjung dalam jumlah sebanyak-banyaknya demi meningkatkan perekonomian tanpa menyeimbangkannya dengan kapasitas SDM dan SDA yang ada di Kandri.

Selain itu, terdapat beberapa kelemahan yang masih dijumpai dalam pembangunan Desa Wisata berbasis masyarakat bila menurut prinsip memelihara karakter dan budaya lokal yang unik. Beberapa pembangunan tampak hanya pada pembangunan fasilitas dan pembuatan obyek-obyek wisata

yang mengikuti *trend* di masyarakat dimana pembangunan tersebut memakan dana yang tidak sedikit akan tetapi belum menjamin keberlanjutannya. Padahal semestinya yang perlu dipertahankan yaitu keunikan dan potensi lokal yang dimiliki di daerah tersebut yang bisa diolah dan dibina lagi baik dari sumber daya manusia maupun mengangkat kembali nilai jual kearifan lokal daerah tersebut. Begitu pula pada pemerintah maupun Pokdarwis yang pemahamannya terpaku pada bila membangun pariwisata itu kemudian memanfaatkan segala dana untuk membuat tempat wisata yang justru nyatanya tidak menonjolkan keunikan daerahnya. Pembangunan fasilitas tidak maksimal sedangkan potensi lokal atau aktivitas kearifan lokal masyarakat yang semestinya bisa menjadi keunikan perlu diasah menjadi nilai jual justru malah terabaikan.

Bila mengacu pada konsep ideal CBT, pada Desa

Wisata yang menjadi atraksi wisata bukanlah sekadar sibuk membangun atau membuat kegiatan wisata yang sedang viral saja. Sehingga tampak dari sini yang diutamakan adalah keuntungan saja namun mengesampingkan potensi dan keunikan yang dimiliki oleh Desa Wisata Kandri. Pengelola masih salah memahami antara objek wisata dengan Desa Wisata. Padahal semestinya yang perlu dipertahankan yaitu keunikan dan potensi lokal yang dimiliki di daerah tersebut yang bisa diolah dan dibina. Selain itu keunikan kampung itulah yang menjadi daya tarik suatu wilayah yang tidak dimiliki kampung lainnya.

Justru Kandri tampak hanya sebagai penyedia tempat bagi pengunjung dan kurang memperkenalkan potensi wilayahnya. Sehingga untuk proses pertukaran atau memperkenalkan budaya keluar masih minim. Fenomena tersebut bila terus berlanjut akan menyebabkan pola pikir pengelola untuk sekadar “menjual desanya”



dimana pengelola dan masyarakat mencari-cari apa yang sekiranya laku oleh pasar, bukan menonjolkan apa yang sebagai bagian penting dalam kearifan lokal Kandri. Pengembangan yang seperti itu lama kelamaan cenderung dapat menimbulkan perubahan pada masyarakat seperti hilangnya ketradisionalan dan aktivitas murni masyarakat. Dalam hal ini masyarakat semestinya dapat memberikan penjelasan mengenai kebiasaan, tradisi dan budaya setempat agar pengunjung lebih mengerti dan terjadi proses belajar bersama. Dengan ini pengunjung bisa lebih mengikuti dan patuh akan kebiasaan serta aturan yang ada di Kandri. Hal ini dapat menunjang adanya saling menghargai dan pengertuan terhadap nilai-nilai yang berbeda.

## **2. Pembahasan**

Pada penelitian ini, penulis menemukan adanya kendala, permasalahan dan tantangan dalam mengembangkan Desa Wisata Kandri. Adapun yang terjadi dalam Desa Wisata Kandri yaitu

sangat minimnya partisipasi masyarakat yang dipicu oleh ketidakmampuan kedua Pokdarwis dalam mengelola Desa Wisata Kandri. Hal tersebut disebabkan karena adanya sikap saling bersaing dan kecenderungan untuk mengejar kepentingan ekonomi semata. Pokdarwis dan masyarakat yang selama ini terkungkung dalam persepsinya yang memandang Desa Wisata sebagai ladang perekonomian semata mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Kandri.

Minimnya partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab kurang berdampaknya kegiatan wisata di Kandri. Pada akhirnya mereka enggan untuk kemudian terlibat dalam setiap kegiatan wisata. Dalam hal ini pengembangan dan pengelolaan ini hanya menguntungkan segelintir pihak saja. Dimana hal tersebut berimbas pada kelalaian dalam memelihara dan menjaga lingkungan serta budaya dan karakter lokal sebagai suatu

kearifan lokal di Kelurahan Kandri.

Ketidakmampuan kedua pengurus Pokdarwis dalam melakukan koordinasi dan kolaborasi serta tidak efektifnya komunikasi Pokdarwis dengan pemerintah kelurahan dalam melaksanakan kegiatan wisata juga menjadi masalah dalam pengembangan Desa Wisata Kandri. Pokdarwis sendiri telah banyak dibimbing dan dilatih namun dalam pengimplementasiannya hasil pelatihan untuk mengelola Desa Wisata Kandri ini belum menunjukkan keseriusan sehingga mempengaruhi dalam kaderisasi dan regenerasi yang bermuara pada kurang efektifnya pengelolaan wisata. Kembali lagi, ketidakseriusan tersebut dikarenakan pemikiran Pokdarwis yang hanya hendak mengutamakan keuntungan ekonomi saja yang pada akhirnya berdampak pada aspek sosial, lingkungan hingga budaya dan kearifan lokalnya yang cenderung terabaikan.

Muncul pemikiran diantara masyarakat yang menimbulkan perbedaan persepsi utamanya akibat pemikiran oportunistis dari segelintir oknum yang akhirnya menjadi pemicu rasa ketidakadilan dan menjadi penyebab pecahnya Pokdarwis Pandanaran. Masyarakat memandang Desa Wisata Kandri ini hanya dalam bingkai ekonomi semata. Pecahnya kelompok tersebut disebabkan adanya rasa kecemburuan antara masyarakat yang tinggal di dekat obyek wisata Goa Kreo dan Waduk Jatibarang dengan masyarakat yang jauh dari obyek wisata tersebut. Masyarakat menganggap bahwa apabila dekat dan mengelola disekitar obyek wisata akan mempunyai peluang ekonomi yang lebih baik.

Pengurus Pokdarwis memiliki sifat individualis dan egoisme yang masih tinggi dan mementingkan kepentingan pribadi dan kurang mengayomi. Salah satunya tampak pada pemilihan paket wisata yang

dilibatkan ternyata juga milik dari anggota Pokdarwis. Yang sangat disayangkan justru yang terjadi saat ini diantara kedua Pokdarwis ini pada akhirnya seperti bersaing untuk mendapatkan pengunjung sebanyak-banyaknya yang justru menimbulkan pembangunan-pembangunan atau kegiatan wisata yang tidak menonjolkan potensi atau kearifan lokal dari Kandri itu sendiri bahkan mengorbankan aspek lingkungan.

Pembangunan pariwisata dalam pendekatan CBT sendiri mengupayakan adanya peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Pembangunan semestinya memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk berusaha dan memiliki andil. Masyarakatlah yang semestinya disentuh terlebih dahulu dalam rangka memperkuat partisipasi dan keberdayaannya. Dari sinilah kemudian kearifan dan keunikan lokal, melestarikan lingkungan hidup dan dampak positif yang nyata dirasakan masyarakat

menemukan relevansinya untuk mencapai tujuan yang berkelanjutan di berbagai aspek dalam masyarakat. Bukan justru meninggalkan kearifan lokal wilayah dan potensi baik SDA maupun SDM wilayahnya.

## **KESIMPULAN**

Desa Wisata Kandri masih banyak dijumpai ketidakefektifan dalam pengelolaannya bila berdasar pada prinsip pembangunan Desa Wisata berbasis masyarakat (CBT). Hal ini yang akan menyebabkan Desa Wisata Kandri cenderung sulit untuk berkelanjutan. Hal tersebut dikarenakan masih lemahnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap perencanaan hingga pelaksanaan setiap kegiatan wisata di Desa Wisata Kandri. Lemahnya peran serta dari masyarakat Kandri ini akan berimbas pada keuntungan dan manfaat yang tidak terdistribusi secara merata kepada masyarakat. Secara tidak langsung, minimnya keterlibatan masyarakat tersebut menunjukkan pengelolaannya masih didominasi oleh kelompok pengelola dan melupakan aspek penting lainnya seperti lingkungan, sosial, budaya, serta kearifan lokal yang menjadi keunikan wilayahnya.

Tidak optimalnya aspek manfaat yang dirasakan masyarakat juga timbul karena adanya sikap oportunistis dari anggota Pokdarwis yang sangat disayangkan justru yang terjadi saat ini diantara kedua Pokdarwis ini pada akhirnya seperti bersaing untuk mendapatkan pengunjung sebanyak-banyaknya. Pengelola masih salah memahami antara objek wisata dengan desa wisata. Hal tersebut yang justru menimbulkan pembangunan atau kegiatan wisata yang tidak menonjolkan potensi atau kearifan lokal dari Kandri itu sendiri melainkan yang diutamakan adalah objek yang sedang ramai dan dianggap bisa menghasilkan keuntungan dengan cepat. Peran pemerintah tetap dibutuhkan dalam hal pengawasan dan pembinaan agar proses pemberdayaan ini betul-betul dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat bukannya hanya dimonopoli oleh mereka yang menjadi anggota pokdarwis.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas maka saran yang disampaikan oleh penulis dalam pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan di Desa

Wisata Kandri, Kota Semarang, sebagai berikut:

Pertama, alangkah baiknya apabila dalam pengelolaannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan lebih cepat. Akan tetapi perlu diingat atau dinilai apakah upaya tersebut akan memberikan keuntungan apabila dipertimbangkan aspek lainnya seperti lingkungan, budaya dan untuk jangka panjang. Utamanya bagi kesempatan dalam melibatkan masyarakat melalui kesempatan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas.

Kedua, Dalam pengembangan potensi dan kearifan lokal yang ada di Kelurahan Kandri perlu untuk diperbarui dengan memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Artinya perlu lebih inklusif memanfaatkan potensi yang ada dalam masyarakat. Tentu dengan bantuan dari berbagai *stakeholders* yaitu masyarakat Kandri sendiri maupun pemerintah melalui pelatihan dan sosialisasi yang diiringi dengan monitoring dan evaluasi. Hal ini bertujuan agar segala pelatihan yang diberikan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya dan membina masyarakat secara menyeluruh tanpa mengecualikan satu pihakpun.

Ketiga, perlunya terlebih dahulu untuk meredam sikap saling bersaing antara Pokdarwis Pandanaran dan Pokdarwis Sukomakmur. Hal tersebut dikarenakan kunci dari segala pengelolaan Desa Wisata berada pada Pokdarwis selaku kelompok lokal. Dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai fasilitator perlu benar-benar hadir di tengah masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Kandri. Pemerintah melalui perantara Pokdarwis diharapkan tetap memberikan edukasi dan *networking* yang terbuka kepada seluruh masyarakat agar dapat membantu meningkatkan kesadaran, kreativitas, dan inovasi masyarakat di Kelurahan Kandri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfiah, S., Andriani, J., Lesmana, R., Sunardi, N., & Furyanah, A. (2019). Manajemen Pengelolaan Desa Wisata Pada Desa Cimanggu, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus Pada Curug Paok Dan Bukit Pasir Jaka). *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).
- Annawang, L., K. (2020). Strategi Desa Wisata Nglanggeran Dalam Mewujudkan Community Based Tourism (CBT) Tahun 2017. Undergraduate Thesis, Faculty of Social and Political Sciences.
- Arida, I. N. S., & Sunarta, N. (2017). *Pariwisata Berkelanjutan*. Bali: Cakra Press.
- Arintoko, A., Ahmad, A. A., Gunawan, D. S., & Supadi, S. (2020). Community-Based Tourism Village Development Strategies: A Case of Borobudur Tourism Village Area, Indonesia. *Geojournal Of Tourism and Geosites*, 29 (2), 398–413.
- Bambang Sunaryo. (2013). Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep Dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media
- Effreyza, Rahmanda. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Wisata Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi di Desa Cempaka Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal). Undergraduate Thesis, Faculty of Social and Political Sciences.
- Gautama, B. P., Yuliawati, A. K., Nurhayati, N. S., Fitriyani, E., & Pratiwi, I. I. (2020). Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 355-369.
- Hadiwijoyo, S. S. (2018). Perencanaan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. Yogyakarta: Suluh Media
- Ikfinasulkha, AN. (2021). Transformasi Kampung Talun Kacang, Kelurahan Kandri,

- Kecamatan Gunungpati Setelah Adanya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata Oleh Pemerintah Dan Kelompok Sadar Wisata Sukomakmur. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 1(1), 1-24.
- Manaf, A., Purbasari, N., Damayanti, M., Aprilia, N., & Astuti, W. (2018). Community-Based Rural Tourism in Inter-Organizational Collaboration: How Does It Work Sustainably? Lessons Learned from Nglanggeran Tourism Village, Gunungkidul Regency, Yogyakarta, Indonesia. *Sustainability*, 10(7), 2142.
- Moren T. Stone & Lesego S. Stone. (2020). Challenges Of Community-Based Tourism In Botswana: A Review Of Literature, *Transactions Of The Royal Society Of South Africa*, 75(2), 181-193.
- Nurhidayati, S. E. (2007). Community Based Tourism (CBT) Sebagai Pendekatan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik*, Th. XX, 3, 191-202.
- Pawson, S., D'Arcy, P., & Richardson, S. (2017). The Value of Community-Based Tourism in Banteay Chhmar, Cambodia. *Tourism Geographies*, 19(3), 378-397.
- Purbasari, N., & Asnawi, A. (2014). Keberhasilan Community Based Tourism di Desa Wisata Kembangarum, Pentingsari Dan Nglanggeran. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 3(3), 476-485.
- Purmada, D. K., & Hakim, L. (2016). Pengelolaan Desa Wisata Dalam Perspektif Community Based Tourism (Studi Kasus Pada Desa Wisata Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 32(2), 15-22.
- Rizkianto, N., & Topowijono, T. (2018). Penerapan Konsep Community Based Tourism Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Berkelanjutan (Studi Pada Desa Wisata Bangun, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 58(1), 20-26.
- Sidiq, A. J., & Resnawaty, R. (2017). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 38-44.
- Utami, R. N. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Sadar Wisata Di Desa Wisata Kandri, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang (Doctoral Dissertation, UNNES).
- Wahyuni, D. (2019). Pengembangan Desa Wisata Pentingsari, Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Masalah Masalah Sosial*, 10(2), 91-106.